



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

DINAS KOPERASI & UKM



www.diskopukm.sumselprov.go.id

KATA PENGANTAR

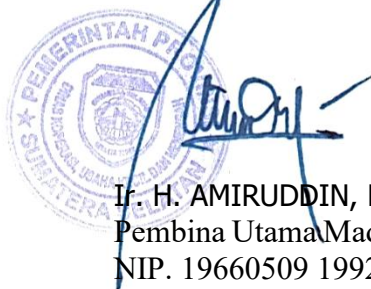
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridho-Nya telah dapat diselesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun kedepan.

Penyusunan RENJA-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 ini dilandasi dengan mempelajari kondisi tahun lalu dan tren yang terjadi dimasa mendatang. Kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional dijadikan acuan di dalam penyusunan, termasuk juga telah mengantisipasi adanya isu strategis dan gejolak sosial sewaktu-waktu yang akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Demikian juga aspirasi masyarakat maupun dunia usaha merupakan masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan, informasi, data, dan kontribusi terhadap tersusunnya RENJA-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026.

Palembang, 05 Desember 2025

KEPALA DINAS KOPERASI & UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660509 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	4
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III	49
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah	52
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV	113
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	113
CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.	114
KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	114
RENCANA TINDAK LANJUT	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1	(TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel 2	(TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	14
Tabel 3	Jumlah Koperasi di Sumatera Selatan.....	20
Tabel 4	Volume Usaha Koperasi di Sumatera Selatan.....	22
Tabel 5	(TC. 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	28
Tabel 6	(TC.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	45
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi & UKM Tahun 2025.....	49
Tabel 8	(TC.33) Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RENJA perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RENSTRA perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja.

Pada rancangan awal rencana kerja telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2024 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2025. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM, baik di Sumatera Selatan maupun nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan urusan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
13. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2026, yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- Bab II merupakan hasil evaluasi RENJA, baik yang telah dilaksanakan hingga tahun 2024 maupun proyeksi pencapaian tahun 2025 serta isu-isu penting penyelenggaraan perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD;
- Bab III Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 serta telaah terhadap kebijakan nasional;
- Bab IV berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif untuk tahun 2026;
- Bab V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2025-2029 Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap rancangan awal RKPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2025-2029. Adapun evaluasi RENJA tahun 2024 didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA tahun 2024 dan perkiraan pencapaian RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2025 disajikan melalui tabel TC.29.

Tabel 1 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	98 %	98 %	100 %	98 %	98,00	100 %	98 %	98,00
2	17	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	95 %	98 %	100 %	98 %	98,00	100 %	98 %	98,00
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	5 dok	3 dok	3 dok	100,00	5 dok	5 dok	100,00
2	17	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA- SKPD	1 dok	1 dok	0 dok	0 dok	33,33	0 dok	0 dok	-
2	17	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA- SKPD	1 dok	1 dok	0 dok	0 dok	-	0 dok	0 dok	-
2	17	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	4 lap	0 lap	1 dok	22,22	0 lap	0 dok	-
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	12 lap	2 lap	14 dok	116,67	0 lap	0 dok	-
2	17	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	97 %	100 %	98 %	97,67	100 %	98 %	97,67
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	91 org/bln	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100,00	14 bulan	14 bulan	100,00
2	17	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dok	13 bulan	13 bulan	13 bulan	100,00	13 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 dok	0 dok	0 dok	33,33	0 dok	0 dok	-
2	17	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 lap	0 lap	0 lap	33,33	0 lap	0 lap	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 lap	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05	1	SubKegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05	2	SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 pkt	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05	3	SubKegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05	5	SubKegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 org	1 kali	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05	10	SubKegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 org	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.05	11	SubKegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 org	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 %	96 %	100 %	97 %	97,00	100 %	97 %	97,00
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 pkt	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	3	SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 pkt	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	7	SubKegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.06	8	SubKegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 lap	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	10	SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.06	11	SubKegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	17	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	2 unit	0 paket	4 paket	40,74	0 paket	4 paket	40,74
2	17	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 pkt	11 %	0 unit	6 paket	94,44	0 unit	6 paket	94,44
2	17	1	1.07	6	SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.07	7	SubKegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya aplikasi/software penunjang operasional perangkat daerah	1 unit	1 aplikasi	1 aplikasi	1 paket	50,00	1 aplikasi	1 paket	50,00
2	17	1	1.07	9	SubKegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.07	10	SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95 %	96 %	100 %	97 %	96,67	100 %	97 %	96,67
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	1	1.08	3	SubKegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	95 %	100 %	97 %	96,67	100 %	97 %	96,67
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100,00	17 unit	17 unit	100,00
2	17	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.09	7	SubKegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.09	8	SubKegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.09	10	SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	17	1	1.09	11	SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terfasilitasnya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	28.71 %	100 %	0 %	100 %	100,00	26,23 %	140 %	100,00
2	17	2	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang difasilitasi izin	50 %	0 %	0 %	0 %	-	50	73 %	100,00
2	17	2	1.01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 unit usaha	20 unit usaha	0 unit usaha	20 unit usaha	100,00	0 unit usaha	20 unit usaha	100,00
					Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang Memiliki Kantor Cabang Resmi dan Berizin	50 %	-	-	-	-	-	-	-

					SubKegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	9,96%	8 koperasi	20 koperasi	8 koperasi	40,00	9,57 %	1,01%	100%
2	17	3	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan SHU Koperasi	7 %	100 orang		100 orang	100,00	5%	-310%	100,00
2	17	3	1.01	3	SubKegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
2	17	3	1.01		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan modal koperasi	8 %	-	-	-	-	6%	35%	100,00
2	17	3	1.01	5	SubKegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 unit usaha	-	-	-	-	20 unit	10 unit	-
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	60 %	8 koperasi	20 koperasi	8 koperasi	40,00	75,95%	101,00%	100,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	4	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi sehat	100 %	0 %	0 %	0 %	-	5 %	2,31 %	100,00
2	17	4	1.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	-	12unit usaha	14 unit usaha	-
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	15,10 %	-	-	-	-	14,35%	1,68%	-
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	7%	395 orang	350 orang	1590 orang	454,29	350 orang	1590 orang	454,29
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 unit usaha	395 orang	438 orang	1678 orang	479,43	438 orang	1678 orang	479,43
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	17,22 %	0 persen	1 persen	1 persen	33,33	16,43%	0,88%	100,00
2	17	6	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	2,03 %	101 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	100,00	8,9%	50%	100,00
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	100,00	20 unit usaha	24 unit usaha	100,00
					SubKegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	17 keluarga	-	-	-	-	20 keluar ga	24 keluar ga	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SubKegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	17 kelompok masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	20 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	100 unit usaha	-	-	-	-	50 unit usaha	50 unit usaha	50 unit usaha
					SubKegiatan Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	50 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	50 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	100 unit usaha	-	-	-	-	20 unit usaha	40 unit usaha	20 unit usaha
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	2,88 %	210 UKM	350 UKM	350 UKM	100,00	2,77%	1,69%	100,00
2	17	7	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha/sultan muda sumsel	10.000 org	1 persen	1 persen	1 persen	100,00	10.000	7.679	100,00
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1000 unit usaha	320 unit usaha	350 unit usaha	670 persen	95,71	100 unit usaha	100 persen	95,71
					SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1.200 unit usaha	-	-	-	-	25 unit usaha	25 unit usaha	-
					SubKegiatan Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	100 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	100 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	100 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SubKegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitas	20 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	15 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	20 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	2.000 unit usaha	-	-	-	-	250 unit usaha	220 unit usaha	-
					SubKegiatan Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	100 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	42,66 persen	11 persen	10 persen	32 persen	106,67	41,00%	99,55%	106,67
2	17	8	1.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	26 persen	80 persen	100 persen	80 persen	80,00	25,0%	27,72%	80,00
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	400 unit usaha	30 unit usaha	30 unit usaha	30 unit usaha	100,00	150 unit usaha	544 unit usaha	100,00
2	17	8	1.01	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	200 org	0 orang	200 orang	200 orang	100,00	-	-	-
					SubKegiatan Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	50 orang	-	-	-	-	-	-	-
					SubKegiatan Fasilitas Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 unit usaha	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan dokumen Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, berikut adalah analisis dari realisasi program dan kegiatan yang disajikan dalam beberapa pokok materi :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Beberapa program tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, baik dari segi keuangan maupun fisik. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kendala teknis, atau tantangan eksternal. Program-program yang tidak memenuhi target meliputi:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) : Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan UMKM di daerah. Berdasarkan data kinerja tahun 2025, program ini menunjukkan hasil yang beragam. Indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha mencapai 1,69%, sedikit di bawah target sebesar 3%. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan telah berjalan dengan baik. Namun, rasio kredit Jumlah wirausaha Sultan Muda terhadap total kredit mencapai 7.679 orang, hampir mencapai target sebesar 10.000, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses pemberdayaan UMKM.
- b. Program Pengembangan UMKM: Program ini fokus pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Program ini menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator proporsi UMKM yang menjalin kemitraan dan ekspor ditargetkan sebesar 41,00% dan terealisasi sebesar 99,55%, yang berarti melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit ditargetkan sebesar 25,0% dan terealisasi sebesar 27,72%, menunjukkan kinerja yang melampaui target. Secara umum, program ini terlaksana efektif dengan dukungan realisasi anggaran yang optimal.
- c. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam : Pada program ini, persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam ditargetkan sebesar 26,23 dan terealisasi sebesar 140%, yang menunjukkan capaian sangat tinggi melebihi target. Untuk kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam lintas daerah, ditargetkan sebanyak 50 koperasi dan terealisasi sebesar 73%, yang menunjukkan sebagian besar target telah tercapai. Adapun kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas ditargetkan 20 unit usaha dan terealisasi sesuai target. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi anggaran yang efisien dan mendukung pencapaian indikator.
- d. Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi : Program ini bertujuan untuk pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Indikator persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi ditargetkan sebesar 9,57% dengan realisasi sebesar 1,01%, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.

Pada indikator pertumbuhan SHU koperasi yang ditargetkan sebesar 5%, realisasi tercatat sebesar -310%, menunjukkan penurunan signifikan dan belum memenuhi target kinerja. Secara umum, program ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan.

- e. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi : Program ini bertujuan untuk menilai kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Persentase koperasi aktif ditargetkan sebesar 75,95% dan terealisasi sebesar 101,00%, yang berarti melampaui target. Namun, pada indikator persentase koperasi sehat yang ditargetkan sebesar 5%, realisasi sebesar 2,31% masih berada di bawah target. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan capaian yang cukup baik pada aspek keaktifan koperasi, namun masih perlu peningkatan dalam aspek kesehatan koperasi.
- f. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian : Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perlindungan koperasi. Indikator persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ditargetkan sebesar 14,35% dengan realisasi sebesar 1,68%, sehingga belum mencapai target. Sementara itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi ditargetkan sebesar 5,0% dan terealisasi sebesar 8,63%, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitasi pelatihan belum optimal, dampak terhadap partisipasi masyarakat cukup positif.
- g. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi : Indikator persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas ditargetkan sebesar 16,43% dan terealisasi sebesar 0,88%, sehingga belum mencapai target. Namun demikian, pada indikator proporsi volume usaha koperasi sektor produksi yang ditargetkan sebesar 8,9%, realisasi mencapai 50,00%, jauh melampaui target. Secara umum, program ini menunjukkan capaian yang beragam, dengan keberhasilan pada peningkatan volume usaha sektor produksi namun masih memerlukan penguatan dalam peningkatan kualitas koperasi.
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyediaan dukungan administrasi dan layanan perkantoran. Pada Tahun 2025, indikator ketersediaan dukungan administrasi dan layanan perkantoran ditargetkan 100% dengan realisasi 83,33%, menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Realisasi kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah (BMD), administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan BMD rata-rata mencapai 83,33%, mencerminkan tata kelola administrasi yang cukup efektif dan sesuai ketentuan. Namun demikian, kegiatan administrasi kepegawaian belum terealisasi (0%) sehingga perlu menjadi perhatian untuk optimalisasi pada periode berikutnya. Secara umum, program ini telah mendukung operasional perangkat daerah secara efektif, tetap memerlukan peningkatan pada beberapa aspek guna mencapai target

kinerja secara optimal.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar program berhasil mencapai target yang direncanakan, menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan eksekusi. Contoh kegiatan yang memenuhi target antara lain:

- a. Administrasi Keuangan dan Tugas ASN: Realisasi 100% dalam hal penyediaan gaji dan tunjangan ASN, serta pelaksanaan tugas administrasi.
- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Realisasi 100% dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas dan fasilitas lainnya selama 12 bulan.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Beberapa program tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melebihi target yang ditetapkan. Program-program ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan kinerja yang lebih baik dari yang diperkirakan. Beberapa program yang melebihi target:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam : Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam mencapai 140% dari target 26,23%.
- b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi mencapai 8,63%, melebihi target 5%.
- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi : Jumlah unit usaha koperasi produktif tercapai 24 unit usaha dari target 20 unit usaha, Jumlah keluarga yang mengikuti program peningkatan kesejahteraan tercapai 24 keluarga dari target 20 keluarga, Koperasi lintas daerah yang diberdayakan mencapai 40 unit usaha, melebihi target 20 unit usaha.
- d. Program Pengembangan UMKM : Proporsi UMKM menjalin kemitraan dan ekspor mencapai 99,65% dari target 41%, Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit tercapai 27,72%, melebihi target 25%. Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi produksi dan pemasaran mencapai 544 unit usaha, jauh di atas target 150 unit usaha.

4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- Tidak tercapainya target: Beberapa faktor penyebab termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi dari masyarakat sasaran. Misalnya, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mengalami capaian negatif menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan dan pengawasan koperasi belum optimal, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja usaha koperasi secara berkelanjutan.
- Terpenuhinya target: Keberhasilan program seringkali disebabkan oleh

perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang cukup, dan dukungan operasional yang kuat. Program seperti Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan lancar berkat pemantauan yang baik.

- Melebihi target: Faktor efisiensi dan tingginya permintaan atau partisipasi menyebabkan beberapa program melampaui target, seperti pendidikan dan pelatihan SDM koperasi yang menerima partisipasi lebih dari yang diperkirakan.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

- Implikasi Positif: Program yang memenuhi atau melebihi target, seperti pendidikan SDM koperasi dan pertumbuhan modal koperasi, memberikan dampak positif terhadap target jangka panjang Renstra. Ini akan membantu mempercepat pencapaian ekonomi daerah berbasis koperasi dan UMKM.
- Implikasi Negatif: Program yang gagal mencapai target, seperti penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, berpotensi menghambat pencapaian target Renstra di sektor pengawasan dan pengembangan koperasi yang sehat. Kegagalan ini bisa memperlambat pencapaian keseluruhan kinerja perangkat daerah.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab

Untuk meningkatkan realisasi program di masa mendatang, beberapa kebijakan dan tindakan perlu diambil, antara lain:

- Perencanaan yang Lebih Matang: Perbaikan dalam proses perencanaan agar sesuai dengan kapasitas pelaksana dan target yang realistis. Program yang gagal, seperti penilaian kesehatan koperasi, perlu diatur ulang dengan target yang lebih terukur.
- Optimalisasi Anggaran: Realokasi anggaran dari program yang gagal atau belum berjalan optimal ke program yang menunjukkan potensi lebih besar. Misalnya, alokasi lebih besar ke pendidikan dan pelatihan SDM koperasi untuk memanfaatkan momentum keberhasilan.
- Peningkatan Koordinasi dan Monitoring: Koordinasi lintas instansi dan peningkatan monitoring perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Program seperti peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan memerlukan monitoring yang lebih intensif untuk memastikan pencapaian.

Secara keseluruhan, sebagian besar program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik, dengan beberapa program bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun, masih terdapat sejumlah program yang gagal mencapai target dan memerlukan evaluasi mendalam serta perbaikan dalam perencanaan dan implementasi. Upaya penguatan koordinasi, peningkatan efisiensi, serta pengelolaan anggaran yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja program di tahun-tahun mendatang.

Adapun Capaian Kinerja OPD Tahun Anggaran Berjalan (sampai dengan triwulan II 2025) dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target/Telah Dilaksanakan
Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, beberapa sub kegiatan telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai rencana. Berikut adalah daftar sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi;
 - d. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi;
 - e. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
 - f. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 - g. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
2. Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target karena Belum Dilaksanakan Beberapa sub kegiatan belum memenuhi target karena belum dilaksanakan, mengindikasikan adanya kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut adalah daftar sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan:
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - b. Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-Undangan dan Tebentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, tangguh dan Akuntabel;
 - c. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - d. Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi;
 - e. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Kesimpulan ini mencerminkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Beberapa sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum

masuk dalam tahap pelaksanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun serta proyeksi capaian indikator kinerja utama pada. Indikator kinerja yang akan dianalisis yaitu mengacu periode Renstra yaitu Renstra 2025-2029. Adapun realisasi capaian kinerja untuk tahun 2025 mencantumkan realisasi sampai dengan data per triwulan II, hal ini disebabkan proses penyusunan Renja berlangsung n-1.

Tabel 2 (TC.30)
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Kewirausahaan	%	2,51	2,57	2,60	2,65	2,70	2,83	2,83	RENSTRA 2025-2029
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	RENSTRA 2025-2029
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,48	0,53	0,58	0,64	0,70	0,77	0,85	RENSTRA 2025-2029

Adapun uraian untuk setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) RASIO KEWIRAUSAHAAN

Rasio Kewirausahaan merupakan salah satu tolok ukur fundamental dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Sesuai dengan metodologi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional, indikator ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki usaha yang mempekerjakan buruh tetap dan dibayar dengan total angkatan kerja, yang datanya bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS.

Peningkatan rasio ini secara langsung berkorelasi dalam upaya mewujudkan "UMKM Naik Kelas", karena setiap wirausaha yang mampu merekrut tenaga kerja formal akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3, Realisasi Rasio Kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten, meskipun terdapat fluktuasi kecil pada tahun tertentu. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 2,11%, kemudian meningkat menjadi 2,26% pada 2021 dan kembali naik menjadi 2,34% pada 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan rasio mencapai 3,03%, seiring bertambahnya jumlah angkatan kerja yang berusaha sendiri maupun dibantu buruh tidak tetap. Pada tahun 2024, rasio kewirausahaan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,51%, yang dipengaruhi oleh peningkatan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah pelaku usaha. Namun demikian, pada tahun 2025 rasio kewirausahaan kembali meningkat menjadi 2,89%, menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kembali minat serta kapasitas masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan. Secara keseluruhan, perkembangan rasio kewirausahaan tersebut mencerminkan perbaikan struktur ketenagakerjaan dan meningkatnya peran kewirausahaan dalam perekonomian daerah, sekaligus mengindikasikan efektivitas berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. Rasio Kewirausahaan Sumatera Selatan Tahun 2020-2025

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	91.468	99.375	105.224	138.924	116.932	134.800
Angkatan Kerja	4.329.746	4.398.907	4.497.960	4.588.170	4.659.809	4.664.935
Rasio Kewirausahaan	2,11%	2,26%	2,34%	3,03%	2,51%	2,89%

Sumber: Sakernas BPS

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan peran sektor kewirausahaan sebagai motor penggerak ekonomi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target untuk periode 2025-2029, Rasio Kewirausahaan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2,83% pada tahun 2029, dengan fokus pada pengembalian tren positif dan penguatan ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh.

Peningkatan ini akan dicapai melalui upaya peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif yang mencakup fasilitasi pelatihan terpadu dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial UMKM, Perluasan Akses dan Inovasi Pembiayaan sebagai jawaban atas tantangan permodalan dengan target meningkatkan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, serta Fasilitasi Kemitraan dan Perluasan Akses Pasar untuk membantu UMKM menghadapi persaingan melalui integrasi ke dalam rantai pasok industri dan pasar global.

Faktor penghambat:

- Kondisi Kredit yang Ketat: Bank dan lembaga keuangan sering menetapkan persyaratan yang ketat untuk pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan start-up.
- Stigma Sosial: Di beberapa budaya, kegagalan bisnis dapat membawa stigma negatif, menghalangi orang untuk mengambil risiko menjadi wirausahawan.
- Pasar yang Jenuh: Persaingan di pasar yang sudah jenuh dapat membuat sulit bagi usaha baru untuk bertahan dan berkembang.
- Keterampilan Manajemen yang Kurang: Pengusaha baru sering kali kekurangan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses.

Dukungan kegiatan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Meracik Kopi Ala Barista, Sertifikasi Halal, Pelatihan Peningkatan SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan ; dan
- 2.1 Bantuan Peralatan, Bimbingan Teknis Bagi UMKM, Entrepreneur Goes to Campus, Festival Gen Z Preneur Fest, Kopi Sriwijaya Fest, Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan melalui Entrepreneur Goes to Campus, UMKM AWARD;

(2) PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH NON PERTANIAN PADA LEVEL PROVINSI

Indikator ini merupakan tolok ukur untuk memantau keberhasilan program pemerintah dalam mendorong transformasi UMKM dari skala mikro menjadi skala kecil dan menengah. Definisi indikator ini adalah perbandingan antara jumlah usaha kecil dan menengah dengan total keseluruhan UMKM (mikro, kecil, dan menengah) pada sektor non-pertanian. Peningkatan proporsi ini menjadi esensial untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional "UMKM Naik Kelas". Hal ini dikarenakan dominasi usaha mikro mengindikasikan kelemahan struktural, seperti keterbatasan sumber daya, produktivitas yang rendah, dan kerentanan terhadap gejolak ekonomi. Peningkatan proporsi ini secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 4. Jumlah UMKM dan Proporsinya Berdasarkan Wilayah di Sumatera Selatan

NO	Kabupaten/Kota	Skala Usaha				Proporsi UMKM
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah	
1	KAB. OGAN KOMERING ULU	53.127	22	4	53.153	9,72%
2	KAB. OGAN KOMERING ILIR	58.354	109	26	58.489	10,70%
3	KAB. MUARA ENIM	84.730	62	13	84.805	15,52%
4	KAB. LAHAT	45.723	346	48	46.117	8,43%
5	KAB. MUSI RAWAS	34.554	103	2	34.659	6,34%
6	KAB. MUSI BANYUASIN	46.728	58	11	46.797	8,56%
7	KAB. BANYUASIN	72.535	123	21	72.679	13,29%
8	KAB. OGAN ILIR	65.096	27	10	65.133	11,92%
9	KAB. OKU TIMUR	76.334	448	67	76.849	14,06%
10	KAB. OKU SELATAN	29.264	220	31	29.515	5,40%
11	KAB. EMPAT LAWANG	31.778	110	9	31.897	5,83%
12	KAB. PALI	17.031	107	11	17.149	3,14%
13	KAB. MUSI RAWAS UTARA	20.639	75	12	20.726	3,79%
14	KOTA PALEMBANG	167.442	241	62	167.745	30,69%
15	KOTA PRABUMULIH	29.449	181	31	29.661	5,43%
16	KOTA PAGAR ALAM	19.348	147	21	19.516	3,57%
17	KOTA LUBUK LINGGAU	43.107	321	51	43.479	7,95%
Jumlah		894.639	2.700	430	897.769	100%

Sumber: SIDT KUMKM 2025 (Hasil Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM)

Berdasarkan Tabel 4, pada tahun 2025, Realisasi Proporsi UMKM mencapai 0,40 persen, sejalan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dengan total UMKM sebanyak 546.724 unit yang kontribusi terbesarnya berasal dari Kota Palembang (30,69%), diikuti Kabupaten Muara Enim (15,52%) dan Kabupaten OKU Timur (14,06%), capaian ini didukung oleh semakin baiknya pendataan UMKM melalui integrasi data kabupaten/kota, konsistensi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM seperti fasilitasi perizinan, pembinaan usaha dan penguatan kelembagaan, dominasi UMKM skala mikro yang relatif stabil, serta peran signifikan wilayah perkotaan sebagai pusat aktivitas ekonomi, namun demikian masih dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan sebaran UMKM antarwilayah, keterbatasan peningkatan skala usaha kecil dan menengah, serta akses permodalan dan pasar yang belum merata terutama di wilayah non-perkotaan, sehingga meskipun indikator telah mencapai capaian kinerja 100 persen dan menunjukkan efektivitas kebijakan yang dilaksanakan, tetap diperlukan penguatan intervensi yang lebih terarah pada wilayah dengan proporsi UMKM rendah serta peningkatan kualitas UMKM agar pertumbuhan ke depan bersifat berkelanjutan. (Tabel 5), yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Akomodasi dan Makanan Minuman.

Tabel 5. Jumlah UMKM per Sektor dan Skala Usaha di Sumatera Selatan

No	Sektor Usaha	Skala Usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	3.474	19	4	3.497
2	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	3.495	11	0	3.506
3	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.945	125	42	2.112
4	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	4.269	11	0	4.280
5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	2.477	13	4	2.494
6	Pertambangan dan Penggalian	5.203	10	7	5.220
7	Real Estat	3.443	19	7	3.469
8	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.816	25	9	5.850
9	Konstruksi	9.235	48	16	9.299
10	Pendidikan	6.671	55	7	6.733
11	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	9.099	31	4	9.134

No	Sektor Usaha	Skala Usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Total
12	Informasi dan Komunikasi	13.208	20	6	13.234
13	Pengangkutan dan Pergudangan	45.836	58	10	45.904
14	Aktivitas Jasa Lainnya	44.307	80	13	44.400
15	Industri Pengolahan	93.141	126	25	93.292
16	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	134.948	185	27	135.160
17	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	508.072	1.864	249	510.185
Jumlah		894.639	2.700	430	897.769

Sumber: SIDT KUMKM (Hasil Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM)

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat struktur perekonomian, Dinas Koperasi dan UKM menetapkan target untuk periode Renstra 2025-2029, proporsi UKM non-pertanian diharapkan meningkat secara bertahap dan konsisten hingga mencapai 0,40% pada tahun 2029. Peningkatan ini akan dicapai melalui implementasi program-program yang memfasilitasi peningkatan kapasitas manajerial, kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, serta pembinaan untuk sertifikasi dan digitalisasi.

3) RASIO VOLUME USAHA KOPERASI TERHADAP PDRB

Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB merupakan alat ukur vital yang dirancang untuk memantau kontribusi riil sektor koperasi terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara total volume usaha yang dihasilkan oleh koperasi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Peningkatan rasio ini secara langsung mencerminkan keberhasilan koperasi dalam meningkatkan aktivitas ekonominya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. Posisi strategis koperasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menempatkannya sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Berdasarkan Tabel 7, capaian kontribusi koperasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan yang diukur melalui Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB menunjukkan capaian sebesar 0,40%. Nilai tersebut diperoleh dari total Volume Usaha Koperasi sebesar Rp2.910.137.071.765 dibandingkan dengan total PDRB ADHB sebesar Rp663.961.720.000.000. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0,53%, realisasi tersebut mencapai 83% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah sudah menunjukkan peran yang cukup signifikan, namun masih terdapat selisih sebesar 0,09 poin persentase dari target yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas usaha koperasi, peningkatan skala usaha, serta optimalisasi produktivitas dan akses pasar agar kontribusi koperasi terhadap PDRB Sumatera Selatan dapat lebih meningkat dan mencapai target yang ditetapkan pada periode berikutnya.

Ketidakstabilan ini terlihat jelas pada indikator modal sendiri yang anjlok dari Rp3.375 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp1.401 miliar pada 2023. Penurunan ini menyebabkan anjloknya volume usaha dari Rp3.006 miliar pada 2022 menjadi Rp2.084 miliar pada 2023, yang pada gilirannya menyebabkan jatuhnya rasio terhadap PDRB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kelembagaan koperasi tumbuh, fondasi permodalan dan bisnisnya masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah menciptakan stabilitas dan resiliensi agar pertumbuhan jumlah koperasi dapat diiringi dengan peningkatan volume usaha yang konsisten.

Tabel 6. Gambaran Kondisi Makro Koperasi di Sumatera Selatan Tahun 2022-2025

No	Indikator	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	4.134	4.310	4.379	7.932
2	Jumlah Anggota (Orang)	282.060	266.328	272.819	270.849
3	Jumlah Sertifikasi NIK (Unit)	805	905	956	960
4	Jumlah Koperasi RAT (Unit)	838	835	894	828
5	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	16.242	15.908	17.186	2.985
6	Jumlah Modal Sendiri (Rp. Miliar)	3.375	1.401	1.551	1.626
7	Jumlah Modal Luar (Rp. Miliar)	3.298	1.117	1.213	1.457
8	Jumlah Aset (Rp. Miliar)	7.724	7.788	7.956	856
9	Jumlah SHU (Rp. Miliar)	125	143	173	146
10	Jumlah Volume Usaha (Rp. Miliar)	3.006	2.084	3.178	2.910

Sumber: ODS Kementerian Koperasi

Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang lebih progresif, Dinas Koperasi dan UKM menetapkan strategi pertumbuhan yang realistis dan terukur untuk periode 2025-2029. Target yang ditetapkan berfokus pada penguatan fondasi sebelum mendorong pertumbuhan yang lebih agresif. Strategi ini selaras dengan program strategis nasional seperti "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih", yang didorong oleh pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa melalui koperasi sebagai pusat produksi dan distribusi.

Tabel 7. Capaian Kontribusi Koperasi terhadap PDRB di Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi SUMSEL	Realisasi NASIONAL
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,40	1,1

Untuk periode 2025-2029, rasio ini ditargetkan mampu mencapai 0,49% pada akhir periode Renstra, dengan proyeksi menstabilkan rasio di level 0,48% selama tiga tahun (2026-2028). Peningkatan ini akan dicapai melalui berbagai program strategis yang berfokus pada modernisasi tata kelola, peningkatan kualitas produk, dan fasilitasi akses pasar yang lebih luas.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan November 2025

Laporan Bank Indonesia Bulan November 2025 menunjukkan bahwa Ekonomi Sumatera Selatan tetap tumbuh kuat pada triwulan III 2025 sebesar 5,20% (yoy) yang didorong oleh percepatan realisasi belanja pemerintah serta terdagangnya daya beli masyarakat. Kinerja perekonomian Sumatera Selatan tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,90% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III 2025 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan kinerja PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal aktivitas investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 bersumber dari komponen LU Pertambangan dan Penggalan serta LU Industri Pengolahan yang memiliki andil tertinggi. Sementara LU dengan pertumbuhan tertinggi yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, LU Administrasi Pemerintah menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 yang sejalan dengan belum optimalnya realisasi belanja pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,8-5,6% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan. Ke depan, inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ setelah pada tahun sebelumnya berada di bawah rentang target. Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Rendahnya jumlah koperasi berkualitas di Sumatera Selatan diawali dengan sedikitnya koperasi yang menerapkan tata Kelola usahanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
 - b. Kaum muda (millenials) sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi yang berdampak pada tata kelola koperasi yang sulit mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan.
2. Kelembagaan
 - a. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal sebab masih didominasi koperasi simpan pinjam (credit union);
 - b. Koperasi akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait;
 - c. Koperasi masih dianggap sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum dipandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan.

Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.

4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM

Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.
- b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi.
- c. Tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.

2. Produksi dan Pemasaran

- a. Jumlah produk UMKM ekspor masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
- b. Kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
- c. Masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara online.
- d. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.

3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Di sisi lain, jasa pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Kelembagaan

Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan yakni mencapai 98,68%.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Peringkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, berdasarkan Global Entrepreneurship Index 2019 (GEI) Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 137 negara. Indeks Entrepreneurship Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia peringkat 43, Brunei Darussalam peringkat 53, Thailand peringkat 54, dan Vietnam 73. Selain itu, rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2020 baru sekitar 3,47%, angka ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Thailand sebesar 4,26 persen serta Malaysia yakni 4,74 persen.

Beberapa permasalahan kewirausahaan di Indonesia dimana bahwa sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dinilai masih rendah seiring dengan rendahnya literasi kewirausahaan sejak usia dini. Selain itu, ekosistem untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan belum menjadi sub sistem yang terbangun di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha. Beberapa pihak banyak yang melakukan pelatihan, pendampingan dan dukungan ekspor namun dilakukan secara sporadis, belum adanya keterhubungan dan sinergi kewirausahaan melalui inkubator, pendekatan ekosistem yang utuh.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan skala usaha, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial budaya di perkotaan maupun perdesaan.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMM juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan UKM kurang optimal untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum selaras dengan struktur organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai,
2. Indikator Kinerja di setiap bidang kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely

(SMART) sehingga berdampak pada aktivitas kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD,

3. Terbatasnya jumlah SDM di OPD yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan dari jumlah SDM yang adapun, kapasitas aparatur yang menguasai substansi Koperasi, UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan masih sangat rendah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas, hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi,
2. Peningkatan akses pembiayaan & kemitraan koperasi,
3. Peningkatan upaya pembaharuan koperasi,
4. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi,
5. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif,
6. Peningkatan usaha yang bertransformasi dari informal ke formal,
7. Terwujudnya pemberdayaan UMKM yang efektif, dan
8. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Pada tabel TC31 disajikan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 5 (TC. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.774.842.260	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.019.285.644	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.774.842.260	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				14.019.285.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	98%	15.274.842.260	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	98%	13.419.285.644	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	95%	100.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	95%	40.000.000	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	40.000.000	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	11.297.829.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	11.515.679.014	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/Bulan	10.873.857.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/Bulan	11.085.803.014	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	409.812.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	409.812.000	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.160.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	20.064.000	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	90.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	90.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	1.420.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	1.800.000.000	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Semua Kota/Kab,	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	300.000.000		Semua Kota/Kab,	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	150.000.000	
		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	700.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	180.000.000	
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	40.000.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	1.290.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	800.000.000	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	300.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	300.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	680.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	965.012.000	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	248.000.000	
		Semua Kel/Desa	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Semua Kel/Desa	Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	325.200.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	707.012.000	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	1.356.813.260	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	493.406.630	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	350.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	195.000.000	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.000.000	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	906.813.260		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	258.406.630	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase koperasi yang memiliki izin	27,87%	87.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase koperasi yang memiliki izin	27,87%	-	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			usaha simpan pinjam					usaha simpan pinjam			
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase koperasi simpan pinjam lintas daerah yang difasilitasi izin</i>	50,00%	87.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase koperasi simpan pinjam lintas daerah yang difasilitasi izin</i>	50,00%	-	
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah</i>	20 Unit Usaha	87.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah</i>	-	-	
			<i>Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>					<i>Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>			
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang Memiliki Kantor Cabang Resmi dan Berizin</i>	50,00%	70.000.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang Memiliki Kantor Cabang Resmi dan Berizin</i>	50,00%	-	
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 Unit Usaha	70.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	-	-	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	9,67%	210.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	9,67%	80.000.000	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pertumbuhan SHU Koperasi	6%	210.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pertumbuhan SHU Koperasi	6%	80.000.000	
2.17.03.1.02.0001	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi										
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	30 Unit Usaha	85.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	40.000.000	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	125.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	40.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase koperasi aktif	60%	75.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase koperasi aktif	60%	-	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase koperasi sehat</i>	5%	75.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase koperasi sehat</i>	5%	-	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>	20 Unit Usaha	75.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>	-	-	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	14,52%	100.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	14,52%	40.000.000	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi</i>	6%	100.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi</i>	6%	40.000.000	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					
		Semua Kota/Kab,	<i>Jumlah SDM yang Memahami</i>	60Orang	100.000.000		Semua Kota/Kab,	<i>Jumlah SDM yang Memahami</i>	25 Orang	40.000.000	
		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Pengetahuan Perkoperasian</i>				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Pengetahuan Perkoperasian</i>			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase meningkatnya koperasi yang	16,83%	228.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase meningkatnya koperasi yang	16,83%	40.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			berkualitas					berkualitas			
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	1,99	228.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	1,99	40.000.000	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	97.600.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	20 Keluarga	28.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	-	-	
		Semua Kel/Desa	Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				Semua Kel/Desa	Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i>	20 Unit Usaha	102.400.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i>	20 Unit Usaha	40.000.000	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	2,80%	300.000.000	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	2,80%	3.029.783.351	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		<i>Jumlah wirausaha/sultan muda sumsel (Orang)</i>	20.000	300.000.000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		<i>Jumlah wirausaha/sultan muda sumsel (Orang)</i>	20.000	-	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan					Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan</i>	110 Unit Usaha	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan</i>	-	-	
		Semua Kel/Desa	<i>Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>				Semua Kel/Desa	<i>Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>			

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	-	-	
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha					Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	342 Unit Usaha	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	-	-	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)	41,41%	500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)	41,41%	900.000.000	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	25,00%	500.000.000	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	25,00%	900.000.000	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					
		Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas	20 Unit Usaha	500.000.000		Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas	135 Unit Usaha	900.000.000	
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			
JUMLAH					16.774.842.260					14.019.285.644	

Berdasarkan tabel TC.31 di atas, berikut adalah penjelasan terkait perubahan pagu anggaran dan target kinerja pada Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) tahun 2026.

1. Total Pagu Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pagu indikatif awal yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp16.774.842.260,- Namun, berdasarkan hasil analisis kebutuhan, anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi Rp14.019.285.644,- dengan penurunan sebesar 16,4%. Penurunan ini terjadi meskipun terdapat beberapa program yang menunjukkan peningkatan target kinerja.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program ini awalnya sebesar Rp15.274.842.260,- namun mengalami penurunan menjadi Rp13.419.285.644,- turun sebesar 12,14%.
- Kinerja: Meskipun terjadi penurunan anggaran, program ini tetap diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Pagu Anggaran: Anggaran administrasi keuangan mengalami kenaikan cukup besar, dari Rp10.873.857.000 menjadi Rp11.085.803.014, atau naik sebesar 1,95%.
- Kinerja: Jumlah anggaran naik, target jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan bertambah karna adanya Pegawai PPPK, yaitu 101 orang/bulan. Ini mencerminkan bahwa meskipun terjadi efisiensi biaya, tidak ada pengurangan dalam alokasi gaji dan tunjangan pegawai.

4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program pendidikan dan latihan perkoperasian turun drastis dari Rp100.000.000 menjadi Rp40.000.000, mengalami penurunan sebesar 60%.
- Kinerja: Jumlah SDM yang ditargetkan untuk memahami pengetahuan perkoperasian berkurang, dari 60 orang menjadi 25 orang, atau menurun sebesar 41,66%. Ini menunjukkan bahwa program pelatihan perkoperasian lebih diarahkan kepada peningkatan kapasitas individu meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program ini turun dari Rp228.000.000 menjadi Rp40.000.000, mengalami penurunan sebesar 82,45%.

- Kinerja: Penurunan anggaran yang cukup besar tersebut menunjukkan adanya kebijakan rasionalisasi dan refocusing anggaran daerah, yang berdampak langsung pada pembatasan ruang lingkup kegiatan dalam program ini. Penyesuaian tersebut menyebabkan tidak seluruh rencana kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dapat dilaksanakan secara optimal, terbatasnya jumlah koperasi sasaran yang dapat difasilitasi, pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan pada pemenuhan target minimal indikator kinerja melalui kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis.
6. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Pagu Anggaran: Program pemberdayaan UMKM mengalami penurunan anggaran drastis, dari Rp300.000.000 menjadi Rp0,- dengan penurunan sebesar 100%.
 - Kinerja: Dalam upaya efektivitas kerja, program ini dielaborasi di program pengembangan UMKM.
7. Program Pengembangan UMKM
- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program ini naik dari Rp500.000.000 menjadi Rp900.000.000,- mengalami kenaikan sebesar 80%.
 - Kinerja: Target pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah bertambah dari 20 unit usaha menjadi 135 unit usaha, terjadi peningkatan dalam dukungan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Pagu Anggaran: Anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah turun dari Rp.906.813.260,- menjadi Rp. 258.406.630,- menurun sebesar 72%.
 - Kinerja: Alokasi ini difokuskan pada pemeliharaan gedung kantor dengan satu gedung yang direhabilitasi.
9. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- Pagu Anggaran: Anggaran Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi mengalami penurunan anggaran dari Rp85.000.000,- menjadi Rp40.000.000, turun sebesar 52,95%.
 - Kinerja: kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
10. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pagu Anggaran: Anggaran Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi mengalami penurunan anggaran drastis dari Rp125.000.000 menjadi Rp40.000.000, turun sebesar 68%.
 - Kinerja: Penurunan anggaran yang cukup signifikan tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja daerah. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi lintas daerah kabupaten/kota, berkurangnya jumlah koperasi yang dapat dilakukan pemeriksaan dan pengawasan, pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan pada koperasi yang memiliki tingkat risiko dan urgensi pengawasan yang lebih tinggi.

11. Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

- Pagu Anggaran: Program ini mengalami penurunan anggaran drastis dari Rp75.000.000 menjadi Rp0, turun sebesar 100%
- Kinerja: Dalam upaya adanya efektivitas kerja, program ini dielaborasi dalam kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan pada beberapa program, seperti Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan pendidikan perkoperasian, ada peningkatan signifikan pada anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Hal ini mencerminkan bahwa fokus pemerintah daerah bergeser untuk memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi serta menjaga keberlangsungan operasional perangkat daerah melalui menerima gaji dan tunjangan ASN yang memadai.

Penurunan anggaran pada beberapa program disertai dengan efisiensi yang diterapkan mengorbankan target kinerja, sementara peningkatan anggaran diarahkan untuk program-program strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengembangan UMKM.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini diuraikan program/kegiatan dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Musrenbang SKPD melalui portal SIPD RI.

Tabel 6 (TC.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	Permohonan Bantuan Peralatan Bagi UMKM di Kota Pagar Alam	80 unit	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jalan Sultan M. Mansyur 32 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan	Penyediaan paket starter usaha 100 UMKM di Kota Palembang	100 UMKM	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten	Tim PKK Desa Tanjung Menang Meminta bantuan (2 Set Roltop, Mesin Parutan Cabe Besar, Mesin Parutan Kelapa Besar, Kompor	1 Paket	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	Rinnai Mata 1000) di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat		Khusus
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Desa Tanjung Ning Tengah, KEcamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang., Provinsi Sumatera Selatan	peningkatan akses permodalan UMKM desa, di Desa Tanjung Ning Tengah, KEcamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang.	1 Paket	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	desa Tugu Mulyo, Provinsi Sumatera Selatan	Kurangnya fasilitas yang memadai untuk UMKM, seperti akses ke pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur yang mendukung, yang menghambat perkembangan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di pasar.	-	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Desa Margo Koyo, Provinsi Sumatera Selatan	Usul Bantuan untuk UMKM yang belum tersentuh di Desa Margo Koyo	1 desa	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kelurahan Sungai Lilin Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Provinsi Sumatera Selatan	Bantuan mesin Jenset 5.000 V dan kendaraan bermotor roda tiga untuk Kelompok UMKM RT 03 RW 03 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	1 Paket	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Selangit dan Kecamatan STLU Terawas , Provinsi Sumatera Selatan	Bantuan UMKM di Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Selangit dan Kecamatan STLU Terawas	15 UMKM	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
9	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka, Provinsi Sumatera Selatan	Permohonan Bantuan Alat Penggilingan Mie	1 UNIT	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. PALI	Rumah Kemasan UMKM	1 unit	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Lokasi : Kota Palembang	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan / Target : 120 Orang	120 org	Disetujui pelatihan diakomodir dalam renja dengan catatan: Untuk Koperasi : mendukung program Koperasi Merah Putih Untuk UKM : UMKM klasifikasi kecil, atau skala mikro namun potensi menjadi kecil dan mendukung program 100rb Sultan muda
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Lokasi : Kota Palembang	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	35 kop	Disetujui pelatihan diakomodir dalam renja dengan catatan: Untuk Koperasi : mendukung program Koperasi Merah Putih Untuk UKM : UMKM klasifikasi kecil, atau skala mikro namun potensi menjadi kecil dan mendukung program 100rb Sultan muda
13	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kecamatan Martapura	Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	24 ekor	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
14	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Lokasi : Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Karang Dapo	Usul Bantuan untuk UMKM	-	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
15	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pasar Kecamatan Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo, Rawas Ilir dan Ulu rawas	Usul Bantuan untuk UMKM	-	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
16	Dinas Perindustrian	Kecamatan Nibung	Hilirisasi dan Industralisasi 10 IKM Pengelolaan Hasil Perkebunan (sawit)	-	Dinas Perindustrian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Seluruh Kecamatan	UMKM Baru	50 umkm	Disetujui pelatihan diakomodir dalam renja dengan catatan: Untuk Koperasi : mendukung progam Koperasi Merah Putih Untuk UKM : UMKM klasifikasi kecil, atau skala mikro namun potensi menjadi kecil dan mendukung program 100rb Sultan muda
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Seluruh Kecamatan	Revitalisasi dan Penguatan 20 Koperasi aktif dan Sehat	20 kop	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
19	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Tungkal Jaya dan Keluang, Kecamatan Sekayu dan Sanga Desa	Usul Bantuan untuk UMKM	-	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
20	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kecamatan Babat Toman	Usul Bantuan untuk UMKM	-	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
21	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kecamatan Sekayu	Pelatihan strategi branding produk, e-commerce, dan digitalisasi laporan keuangan UMKM	30 umkm	Dinas Perindustrian
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Palembang	Pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha kuliner dalam produksi kue dan roti (bakery)	20 org	Disetujui pelatihan diakomodir dalam renja dengan catatan: Untuk Koperasi : mendukung progam Koperasi Merah Putih Untuk UKM : UMKM klasifikasi kecil, atau skala mikro namun potensi menjadi kecil dan mendukung program 100rb Sultan muda
23	Dinas Perumahan dan Permukiman	KAB. LUBUK LINGGAU	Pembangunan Taman Kuliner TOS	-	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	KAB. LAHAT	pendidikan dan pelatihan	-	Disetujui pelatihan diakomodir dalam renja dengan catatan: Untuk Koperasi : mendukung progam Koperasi Merah Putih Untuk UKM : UMKM klasifikasi kecil, atau skala mikro namun potensi menjadi kecil dan mendukung program 100rb Sultan muda
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Desa karang dapo baru kecamatan sikap dalam dan kelurahan pendopo kecamatan pendopo	Usul Bantuan untuk UMKM	-	Ditolak karena bukan kewenangan Provinsi, dapat diusulkan melalui mekanisme Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang bertema Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, menetapkan Trisula Pembangunan sebagai target prioritas nasional, meliputi Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan, dan Peningkatan SDM Berkualitas. RKP 2026 juga memuat Prioritas Nasional Unggulan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan, yakni Program Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Pendidikan, Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu, dan Pengelolaan Sampah Terpadu. Berikut adalah telaah komprehensif yang terstruktur mengenai kebijakan tersebut :

1. Gambaran Umum Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengusung tema *"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"*.

Tema tersebut menegaskan peran strategis sektor ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM, sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional.

RKP 2026 menetapkan Trisula Pembangunan sebagai target prioritas nasional, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketiga sasaran tersebut sangat relevan dengan pengembangan koperasi dan UMKM yang berperan sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi lokal, dan sarana peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Keterkaitan Prioritas Nasional Unggulan dengan Urusan Koperasi dan UMKM

Prioritas Nasional Unggulan dalam RKP 2026 memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan koperasi dan UMKM, antara lain:

1. Koperasi Desa Merah Putih

Merupakan kebijakan strategis dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa berbasis koperasi. Program ini mendorong koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi produktif, distribusi pangan, pembiayaan usaha, dan pemasaran produk lokal.

2. Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu

Koperasi dan UMKM berperan sebagai instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses permodalan, serta penguatan kapasitas usaha.

3. Program Makan Bergizi Gratis

Memberikan peluang bagi UMKM pangan lokal dan koperasi produsen untuk terlibat dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan, sehingga mendorong pertumbuhan usaha sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

4. Pembangunan Rumah

Berpotensi mendorong UMKM sektor konstruksi, bahan bangunan, dan jasa pendukung, serta memperluas peran koperasi dalam penyediaan bahan dan layanan pendukung perumahan rakyat.

5. Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Pendidikan

Mendukung peningkatan kualitas SDM pelaku koperasi dan UMKM melalui pelatihan, literasi digital, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pemasaran usaha.

6. Pengelolaan Sampah Terpadu

Membuka peluang pengembangan UMKM dan koperasi di sektor ekonomi sirkular, seperti daur ulang, pengolahan sampah berbasis komunitas, dan usaha ramah lingkungan.

3. Implikasi terhadap Perencanaan Urusan Koperasi dan UMKM di Daerah

Kebijakan nasional dalam RKP 2026 menjadi acuan penting dalam penyusunan perencanaan daerah, khususnya pada urusan koperasi dan UMKM. Pemerintah daerah perlu:

- menyelaraskan program pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan prioritas nasional,
- memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi desa dan lintas sektor,
- mendorong peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing UMKM,
- serta memperluas akses UMKM terhadap pasar, pembiayaan, dan digitalisasi.

4. Peran Pemerintah Daerah

Dalam mendukung implementasi RKP 2026, pemerintah daerah berperan dalam:

- pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi,
- fasilitasi UMKM untuk terlibat dalam program nasional,
- peningkatan sinergi antar-OPD dan pemangku kepentingan,
- serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja koperasi dan UMKM.

Kebijakan terkait koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang tertuang dalam RKP 2026 dirancang secara komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Fokus utama terletak pada penguatan kelembagaan, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, serta pengembangan kewirausahaan berbasis riset dan inovasi. Dengan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, diharapkan sektor koperasi, UMKM, dan kewirausahaan mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil dan merata.

Dengan strategi kebijakan prioritas Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi di atas telah sejalan dengan kebijakan pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Koperasi dan UKM yang mendukung visi kepala daerah yaitu:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Dan bersinergi dalam tataran Prioritas Daerah yakni pada "Prioritas Daerah 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat" serta "Prioritas Daerah 5: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan”

Selanjutnya, mengacu pada tema pembangunan daerah maka diharapkan peran Koperasi dan UMKM dapat mendukung dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas tingkat nasional.

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis tahun 2025-2029. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026:

Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi & UKM Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian		Rasio Kewirausahaan	2,60%
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	0,42%
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,58%
		1.Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah 2.Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan 3.Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi	Pertumbuhan wirausaha	1,2%
			Persentase meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha (%)	7,24%
			Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	12,71%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya: kebijakan Nasional, RPJP, RPJMD, dan Renstra SKPD. Secara garis besar usulan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 5 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan pagu

indikatif sebesar Rp14.019.285.644,- yang bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi sasaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah 17 Kab/Kota se-Sumatera Selatan. Adapun Rumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel TC.33 berikut ini.

Tabel 8 (TC.33)
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
A	2.17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah		98%	15.274.842.260			98%	18.725.000.000			
	2.17.01.101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	Sumsel	95%	100.000.000	PAD		95%	500,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.101.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	2 dokumen	100.000.000	PAD		2 dokumen	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen Perencanaa n
	2.17.01.101.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen RKA

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.101.03	Sub Kegiatan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen Perubahan RKA
	2.17.01.101.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen DPA

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.101.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen Perubahan DPA
	2.17.01.101.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja; Dokumen

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.101.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumsel	-	-	PAD		3 laporan	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Laporan Evaluasi; Dokumen
	2.17.01.101.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sumsel	-	-	PAD		1 data	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Data; Dokumen

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.101.09	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	-	-	PAD		1 Berita Acara	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = BA; Dokumen
	2.17.01.101.10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.101.11	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen
	2.17.01.101.12	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.101.13	Sub Kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Sumsel	-	-	PAD		1 Substansi	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Substansi, Dokumen
	2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100%	11.297.829.000			100%	11,885,803,014	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Koperasi	untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.102.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumsel	98 OB	10.873.857.000	DAU		101 OB	11,085,803,014	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Tambah Akres 2,5%
	2.17.01.102.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sumsel	12 dokumen	409.812.000	PAD		13 dokumen	500,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Gaji PPPK PW 13 Bulan

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Koperasi	untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.102.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumsel	12 dokumen	14.160.000	PAD		12 dokumen	200,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Honor pejabat penatausa haan keuangan dan lain- lain
	2.17.01.102.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Output = Dokumen

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Koperasi	untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.102.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 Laporan	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen
	2.17.01.102.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Output = Dokumen

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Koperasi	untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.102.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumsel	-	-	PAD		12 Laporan	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output = Dokumen
	2.17.01.102.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Output = Dokumen

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
												untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi BMD Perangkat Daerah	Sumsel	-	-			95%	170,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.1.03.0 1	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	-	-	PAD		2 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.03.0 2	Sub Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.1.03.0 3	Sub Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 Laporan	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.03.0 4	Sub Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumsel	-	-	PAD		12 Laporan	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.1.03.05	Sub Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 Laporan	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.03.06	Sub Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 Laporan	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.1.03.07	Sub Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sumsel	100%	90.000.000			100%	355,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
												masyarakat	
	2.17.01.105.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumsel	-	-	PAD		2 unit	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.105.02	SubKeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumsel	-	-	PAD		2 paket	150,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	Baju Seragam

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.105.03	SubKeg Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.105.04	subKeg Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.105.05	subKeg Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.105.09	subKeg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumsel	4 Orang	90.000.000	PAD		2 org	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.105.10	subKeg Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sumsel	-	-	PAD		10 org	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.105.11	subKeg Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Sumsel	-	-	PAD		5 org	25,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Sumsel	100%	1.450.000.000	PAD		100%	1,534,196,986	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.106.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumsel	1 paket	50.000.000	PAD		1 paket	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.106.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	1 paket	300.000.000	PAD		1 paket	200,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Belanja Modal, Belanja AC, PC dll

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.106.03	sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		1 paket	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.106.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumsel	2 Paket	250.000.000	PAD		2 paket	250,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Makan-Minum Rapat, ATK

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.106.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sumsel	1 paket	50.000.000	PAD		1 paket	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.106.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		1 dokumen	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.106.07	sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		1 paket	20,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.106.08	sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumsel	-	-	PAD		1 laporan	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.106.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam daerah dan luar daerah	12 laporan	700.000.000	PAD		12 laporan	664,196,986	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Output=Perjal anan Dinas
	2.17.01.106.10	sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	PAD		1 dokumen	50,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.106.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumsel	1 dokumen	100.000.000	PAD		1 dokumen	100,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Website Dinas Koperasi
	2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah		100%	300.000.000			100%	1,300,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.107.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		1 Unit	300,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	1 Mobil
	2.17.01.107.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	300.000.000	PAD		1 Paket	300,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	Untuk Keperluan meja, kursi pegawai

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.107.06	sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		20 Unit	300,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.107.07	sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		1 Unit	100,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.107.08	sub kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		1 Unit	100,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.107.09	sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		0 unit	0	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.107.10	sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		1 unit	200,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	680.200.000			100%	830,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.08.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumsel	12 Laporan	15.000.000	PAD		12 laporan	30,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumsel	12 laporan	340.000.000	PAD		12 laporan	300,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.08.0 3	sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	-	-	PAD		12 laporan	200,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.08.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumsel	12 laporan	325.200.000	PAD		12 laporan	300,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam	Jasa Kebersihan,K eamanan (Kontrak)

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	1.356.813.260	PAD		100%	2,150,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.109.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumsel	25 unit	350.000.000	PAD		15 unit	350,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pemeliharaan Kendaraan,P ajak Kendaraan, BBM

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.109.05	sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sumsel	-	-	PAD		50 unit	100,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Pemeliharaan Mebel
	2.17.01.109.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	20 Unit	100.000.000	PAD		50 unit	200,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pemeliharaan AC dan mesin lainnya

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.109.07	sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	-	-	PAD		1 unit	100,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.109.08	sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Sumsel	-	-	PAD		1 unit	100,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.109.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sumsel	1 unit	906.813.260	PAD		2 unit	900,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Rehab Gedung, Reno vasi Halaman Parkir, Pagar
	2.17.01.109.10	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumsel	-	-	PAD		1 unit	200,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.01.109.11	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumsel	-	-	PAD		1 unit	200,000,000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam		27.87%	87.000.000	PAD		28.15%	400,000,000			

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.02.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam lintas daerah yang difasilitasi izin		50.00%	87.000.000	PAD		50.00%	200,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.02.1.01.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Sumsel	50.00%	87.000.000	PAD		100 Unit Usaha	200,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Izin Khusus Koperasi Simpan Pinjam, Sosialisasi

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.02.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang Memiliki Kantor Cabang Resmi dan Berizin		-	-			50.00%	200,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.02.1.01.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Sumsel	-	-	PAD		100 Unit Usaha	200,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Izin Khusus Koperasi Simpan Pinjam, Sosialisasi

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
3	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi		9.67%	210.000.00	PAD		9.76%	1,700,000,000			
	2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan SHU Koperasi		6 %	85.000.000			6%	1,500,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Sumsel	30 Unit Usaha	85.000.000	PAD		184 unit	1,500,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	Koperasi yang diawasi dan dibina (sesuai dengan peraturan baru)

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
												ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya		6 %	125.000.000	PAD		7%	200,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.03.1.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Sumsel	30 Unit Usaha	85.000.000	PAD		100 unit	200,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka	Koperasi yang diawasi dan dibina (sesuai dengan peraturan baru)

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
												ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif		60%	75.000.000			60%	200,000,000			
	2.17.04.1.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase koperasi sehat</i>		5%	75.000.000			5%	200,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Sumsel	25 unit	75.000.000	PAD		100 unit	200,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Penilaian Kesehatan Koperasi (melibatkan akuntan publik)
5	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		14.52%	100.000.000	PAD		14.74%	400,000,000			

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi		6%	100.000.000			6%	400,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.05.1.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sumsel	50 Orang	100.000.000	PAD		100 Orang	400,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Pelatihan pengurus KDKMP

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
6	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas		16.83%	228.000.000	PAD		16.99%	7,100,000,000			
	2.17.06.1.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi		1,99 %	228.000.000	PAD		2.01	7,100,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.06.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	Sumsel	100 Unit Usaha	97.600.000	PAD		-	-			Subkegiatan hilang di SIPD Renja 2027

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.06.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	<i>Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan</i>	Sumsel	17 Kelompok Masyarakat	28.000.000	PAD		-	-			Subkegiatan hilang di SIPD Renja 2027
	2.17.06.1.01.09	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i>	Sumsel	100 Unit Usaha	102.400.000	PAD		-	-			Subkegiatan hilang di SIPD Renja 2027
	2.17.06.1.01.11	Sub Kegiatan Digitalisasi pencatatan transaksi dan operasional koperasi	Jumlah koperasi yang menggunakan aplikasi digital	Sumsel	-	-	PAD		220 unit usaha	4,100,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	aplikasi digital koperasi
	2.17.06.1.01.12	Sub Kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan	Sumsel	-	-	PAD		150 Unit Usaha	3,000,000,000	Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi	Fasilitasi Koperasi

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
			revitalisasi									berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
7	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)		2,8%	300.000.000	PAD		2.83%	8,500,000,000			
	2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha/sultan muda sumsel (Orang)		20.000	300.000.000	PAD		40,000	8,500,000,000			

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.07.1.01.1 3	Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	Sumsel	110 Unit Usaha	100.000.000	PAD		100 orang	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda
	2.17.07.1.01.1 4	Sub Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	Sumsel	-	-	PAD		1010 unit usaha	1,200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.07.1.01.015	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Sumsel	60 Orang	100.000.000	PAD		1000 Orang	5,000,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda
	2.17.07.1.01.16	Sub Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Sumsel	342 Unit Usaha	100.000.000	PAD		1000 unit usaha	1,000,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.07.1.01.1 7	Sub Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	Sumsel	-	-	PAD		100 Unit Usaha	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda
	2.17.07.1.01.0 18	Sub Kegiatan Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Sumsel	-	-	PAD		100 Kegiatan	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.07.1.01.019	Sub Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	Sumsel	-	-	PAD		20 Unit Usaha	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda
	2.17.07.1.01.20	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Sumsel	-	-	PAD		20 Orang	100,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.07.1.01.2 1	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	Sumsel	-	-	PAD		200 Orang	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda
	2.17.07.1.01.0 22	Sub Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sumsel	-	-	PAD		100 Unit Usaha	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
8	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)		41,41 %	500.000.000	PAD		41.82%	4,300,000,000			
	2.17.08.1.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)		25 %	500.000.000	PAD		25.00%	4,300,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	
	2.17.08.1.01.01	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>	Sumsel	20 Unit Usaha	500.000.000							

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.08.1.01.09	Sub Kegiatan Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator	Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan	Sumsel	-	-	PAD		1 Lembaga	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda
	2.17.08.1.01.11	Sub Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	Sumsel	-	-	PAD		10 Unit Usaha	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.08.1.01.1 2	Sub Kegiatan Fasilitas Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Sumsel	-	-	PAD		50 Orang	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda
	2.17.08.1.01.1 5	Sub Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	Sumsel	-	-	PAD		200 Unit Usaha	3,000,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.08.1.01.2 1	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	Sumsel	-	-	PAD		15 Unit Usaha	500,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda
	2.17.08.1.01.2 4	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Sumsel	-	-	PAD		50 Dokumen	200,000,000	Pengendalian Inflasi	PD 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	100,000 sultan muda

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Jumlah						16.774.842.260				41,325,000,000			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan Pemerintah Daerah adalah pembuatan dokumen RKPD. Dokumen RKPD ini mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD. Selain itu dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.

Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

BAB V

PENUTUP

CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 isusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan RENJA Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Komitmen tersebut selanjutnya harapnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2026 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya

RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, selanjutnya RENJA Tahun 2026 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 No. 565

Telp. (0711) 355804

Fax. (0711) 352082

PALEMBANG - 30129